

Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

AKURASI
95

Melina Febi Awani & Swarmilah Hariani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta

Short Report

Financial Management

Abstract

This study aims to analyze the performance of local governments in all districts on the island of Sumatra for the 2015-2018 budget year. The data used is secondary data obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia in the form of a Budget Realization Report for the 2015-2018 fiscal year. This study is a descriptive study using an analysis of regional independence ratios and financial ratios to assess the performance of local governments in all districts on the island of Sumatra. The results showed that, the development of the level of regional independence of all districts on the island of Sumatra during 2015-2018 was at a low point, namely with an average yield of only 25%, so for the development of the level of efficiency in the management of regional expenditures of all districts on the island of Sumatra, it can be said less efficient. And then for the development of the level of effectiveness of the management of Regional Original Income, it can be said to be effective, namely with an average yield of above 90%, while for the growth rate of Regional Original Income it is still in a fluctuating condition.

Keywords:

Local Government Performance, Effectiveness, Efficiency, Growth rate

Received: 20 Aug 2021

Accepted: 25 Aug 2021

Online: 31 Aug 2021



Akurasi: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 3, No.2, 2021,
pp. 95 - 102
eISSN 2685-2888

Corresponding Author:

Melina Febi Awani

Universitas Mercu Buana

Email: melinaawani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>



© The Author(s) 2021

CC BY This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) selama periode tertentu, serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Disamping itu APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama masa 1 (satu) tahun anggaran. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam APBD yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan sosial masyarakat. Kemudian untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

Perhitungan rasio dalam mengukur kemampuan keuangan daerah berguna untuk menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik, yaitu bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan dalam menunjukkan bahwa uang tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif.

Permasalahan utama yang hingga saat ini masih sering dihadapi Pemerintah Daerah di Indonesia berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah ialah rendahnya (PAD) dan tingginya ketergantungan dengan dana transfer Pemerintah Pusat. Salah satunya yang terjadi pada seluruh Kabupaten di Pulau Sumatera. Walaupun Pulau Sumatra merupakan pulau yang memiliki Kabupaten terbanyak se-Indonesia dan didukung dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar, akan tetapi tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal masih terlalu tinggi ((Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia., 2019; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017, 2017; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016, 2018).

Salah satu tujuan dari dilaksanakannya analisa kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui naik turunnya kinerja keuangan daerah. Dan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Pulau Sumatera maka akan dilakukan analisa rasio keuangan antara APBD dengan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2015-2018 yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera. Dan untuk perhitungan rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian daerah, rasio efisiensi keuangan, rasio efektifitas keuangan, dan rasio pertumbuhan PAD.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya (Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi, 2017; Wiratna Sujarweni, 2015). Berdasarkan *Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menganalisa laporan keuangan yaitu dengan melakukan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan angka yang dihasilkan dari perbandingan antara suatu pos di dalam laporan keuangan dengan pos lainnya. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Suratna, 2017). Dalam penelitian ini analisa kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio, diantaranya:

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya (Faud, 2016). Pemerintah Daerah masih belum mampu secara mandiri membiayai kegiatan pemerintahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kemudian ini juga berarti bahwa peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerah adalah masih sangat rendah, yang dalam hal ini berupa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi (Hariani, 2021).

Rasio Efisiensi

Sartika, (2019) mengatakan bahwa rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rasio Efektivitas

Mardiasmo (dalam Pangkey & Pinatik, 2015) mengatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Sedangkan (Faud, 2016) mengatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar nilai rasio yang diperoleh atau semakin besar target yang direalisasi, mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan, begitu juga sebaliknya.

Rasio Pertumbuhan

Rahmayanti (dalam Marsudi et al., 2019) mengatakan bahwa rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Apabila rasio pertumbuhan menunjukkan angka positif maka menggambarkan kinerja keuangan meningkat dan begitu pula sebaliknya.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut (Sugiyono, 2008 dalam Rahmayati, 2016). Metode studi kasus ini akan dibatasi oleh bukti-bukti kuantitatif berupa angka-angka yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data arsip/dokumen (*library research*). Data yang didapat dari teknik pengumpulan arsip adalah data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2016) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Dokumen yang dikumpulkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten di Pulau Sumatra periode 2015-2018. Data tersebut diperoleh dari sumber publikasi Badan Pemeriksa Keuangan yakni melalui <https://e-ppid.bpk.go.id/>, jurnal-jurnal ilmiah, buku pustaka, serta materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengukuran

Dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruh Kabupaten di Pulau Sumatra pada periode 2015-2018, rumus-rumus yang digunakan diantaranya:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Abdul Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut (Halim, 2007):

$$RK = \text{PAD} / \text{Pendapatan Eksternal} \times 100$$

Rasio Efisiensi

Sartika (2019) mengatakan bahwa rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut (Halim, 2007):

$$RES = \text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan} \times 100$$

Rasio Efektivitas

Faud (2016) mengatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2018):

$$REF = \text{Realisasi PAD} / \text{Anggaran PAD} \times 100$$

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rahmayanti (dalam Marsudi et al., 2019) mengatakan bahwa rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Halim, 2007) :

$$PAD = \frac{PAD(n) - PAD(n-1)}{PAD(n-1)}$$

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah kedalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah mengerti dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data diantaranya :(1) membuat tabel ringkasan pendapatan dan belanja daerah; (2) menghitung rasio keuangan (rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan) berdasarkan data yang diperoleh dengan membuat table; (3) membuat tabel dari hasil perhitungan rasio keuangan dari setiap periode; dan (4) mendeskripsikan data yang merupakan hasil perhitungan rasio keuangan atau melalui grafik yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian daerah seluruh Kabupaten di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2018 diperoleh gambaran bahwa tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah yaitu berada pada tingkat dibawah 25% dari total keseluruhan pendapatan daerah atau termasuk didalam pola hubungan instruktif. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah masih belum optimal, hal ini dikarenakan lebih dari 50% kebutuhan pendanaan daerah masih dibiayai oleh pendanaan eksternal yaitu bantuan pemerintah (transfer) dan pinjaman (Tabel 1).

Tabel 1

Rata-Rata Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Per Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2018

No	Nama Daerah	Kemandirian			
		2018	2017	2016	2015
1	Sumatra Barat	8.73%	12.90%	7.79%	7.57%
2	Sumatra Selatan	7.39%	9.55%	6.66%	7.30%
3	Sumatra Utara	10.30%	11.20%	7.01%	7.13%
4	Riau	9.19%	13.40%	7.54%	10.30%
5	Kepulauan Riau	17.40%	20.70%	17.70%	22.20%
6	Aceh	15.60%	9.35%	9.51%	9.52%
7	Jambi	8.65%	8.70%	7.54%	7.83%
8	Bengkulu	7.38%	6.87%	5.40%	4.87%
9	Lampung	5.95%	5.81%	5.20%	5.18%
10	Bangka Belitung	14.60%	18.70%	12.10%	11.10%
	Rata-Rata Se-Pulau Sumatera	10.50%	11.70%	8.64%	9.30%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh Kabupaten di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2018 diperoleh gambaran bahwa tingkat efisiensi belanja daerah masih berada pada posisi kurang efisien dan tidak efisien yaitu rata-rata persentase efisiensi belanja adalah diatas 90%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah masih belum optimal, hal ini dikarenakan jumlah belanja masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang dimiliki.

Tabel 2.

Rata-Rata Realisasi Anggaran Kabupaten Per Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2018

No	Nama Daerah	Realisasi(%)			
		2018	2017	2016	2015
1	Sumatra Barat	100.56	99.74	103.45	97.13
2	Sumatra Selatan	98.49	99.28	98.77	104.61
3	Sumatra Utara	100.2	101.38	99.53	100.37
4	Riau	94.83	100.79	108.03	128.45
5	Kepulauan Riau	98.55	102.37	89.39	104.1
6	Aceh	112.37	103.32	103.15	104.35
7	Jambi	97.31	98.84	98.36	102.92
8	Bengkulu	100.05	102.85	103.83	100.08
9	Lampung	100.59	102.34	101.19	105.68
10	Bangka Belitung	98.31	96.85	106.27	101.8
	Rata-Rata	100.12	100.78	101.2	104.95

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh Kabupaten di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2018 diperoleh gambaran bahwa tingkat efisiensi belanja daerah masih berada pada posisi kurang efisien dan tidak efisien yaitu rata-rata persentase efisiensi belanja adalah diatas 90%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah masih belum optimal, hal ini dikarenakan jumlah belanja masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang dimiliki.

Tabel 3.

Rata-Rata Efektivitas Kabupaten Per Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2018

No	Nama Daerah	Efektifitas (%)			
		2018	2017	2016	2015
1	Sumatra Barat	90.46	96.72	99.97	105
2	Sumatra Selatan	86.66	82.1	86.68	87.14
3	Sumatra Utara	88.88	88.73	100.36	90.6
4	Riau	90.89	92.21	82.59	96.2
5	Kepulauan Riau	104.14	104.89	105.39	91.04
6	Aceh	88.43	85.04	91.22	98.5
7	Jambi	102.86	105.38	99.18	101.24

8	Bengkulu	86.83	95.14	107	88.99
9	Lampung	82.59	67.27	90.4	104.39
10	Bangka Belitung	104.29	103.42	96.14	99.3
	Rata-Rata	92.6	92.09	95.89	96.24

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas seluruh Kabupaten di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2018 diperoleh gambaran bahwa rata-rata tingkat efektifitas berada pada angka diatas 90% dan dapat dikatakan efektif. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah sudah cukup baik karena dapat merealisasikan anggaran PAD yang direncanakan secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: dilihat dari rasio kemandirian daerah, kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera selama tahun 2015-2018 dapat dikatakan belum optimal. Hal ini karena tingkat kemandirian daerah berada pada tingkat persentase dibawah 25% atau disebut dengan pola hubungan instruktif. Selanjutnya, berdasarkan rasio efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera selama tahun 2015-2018 dapat dikatakan belum optimal. Hal ini karena tingkat efisiensi masih berada pada posisi tidak efisien atau persentase berada pada nilai diatas 100%. Terakhir, dilihat dari rasio efektifitas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera selama tahun 2015-2018 dapat dikatakan baik. Hal ini karena Pemerintah Daerah sudah mampu merealisasikan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan apa yang dianggarkan, dimana rata-rata persentase realisasi sudah diatas 90%.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berkaitan dengan kinerja Pemerintah Daerah adalah pertama, Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan usaha pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD. Kedua, Pemerintah Daerah harus terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektifitas yang baik dapat bertahan secara konsisten dan dapat membantu dalam upaya peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kembali anggaran belanja daerah dan melakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan belanja daerah guna meningkatkan efisiensi keuangan daerah. Dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih memprioritaskan belanja daerah yang mengarah pada pembangunan sarana dan prasarana masyarakat karena sumber PAD banyak yang berasal dari masyarakat berupa pajak dan retribusi daerah, hal ini dilakukan agar dapat memberikan motivasi untuk masyarakat terus ikut serta dalam pembangunan di daerahnya.

Penulis menyadari penelitian ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan yang dialami selama melakukan penulisan ini, oleh karenanya saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: Pertama, riset selanjutnya dapat menggunakan indikator karakteristik kinerja keuangan baik itu kemandirian daerah, efisiensi, efektifitas, maupun pertumbuhan PAD yang bersumber dari Peraturan Pemerintah terbaru. Kedua, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan indikator tertentu dalam mengklasifikasikan daerah yang akan dianalisa, seperti misalnya kapan dan dimana saja daerah yang termasuk dalam pemekaran wilayah. Terakhir, studi berikutnya juga disarankan untuk menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas agar lebih tergambar secara spesifik dan rinci letak perbedaan dan perbandingannya, serta menggunakan jangka waktu terbaru.

REFERENCES

- Abdul Halim. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Abdul Halim, & Muhammad Syam Kusufi. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2018*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2016*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2015*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2017*.
- Faud, R. . (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Hariani, S. (2021). *Analysis of regional government financial performance in south nias district*. 3(3), 161–171.
- Mahmudi. (2018). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Marsudi, J., Supradi, A., & Susandra, F. (2019). Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah : Kajian Pada Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akunida*, 5(2), 32–46.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4), 33–43.
- Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2019).
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*, 1(1), 40–54.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147–153. <https://doi.org/10.47221/tangible.v5i1.103>
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Buku Press Yogyakarta.

DECLARATIONS

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

How to cite this Article

Awani, M., & Hariani, S. (2021). PAnalisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95 - 102.